

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Fungsi dan peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diantaranya adalah merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian, sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat, sebagai penghasil barang dan jasa demi pemenuhan orang banyak, penghasil devisa negara, pendorong dalam aktivitas masyarakat terhadap diberbagai lapangan usaha, dan sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat banyak. Badan Usaha Milik Negara memiliki dua bentuk badan hukum perusahaan, yaitu Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero).

Perusahaan perseroan (Persero) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam pelaksanaan tugasnya Persero dijalankan oleh organ-organ Persero, yaitu: 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), 2) Direksi, dan 3) Komisaris. Sedangkan badan usaha umum (Perum) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Walaupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki dua bentuk hukum perusahaan, namun sampai tahun 2017 hanya Persero yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. (Saham Ok, 2019).

Dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) terdaftar perusahaan swasta dan BUMN. Perusahaan swasta *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berjumlah sekitar 555 sampai dengan tahun 2017. BUMN non-keuangan telah

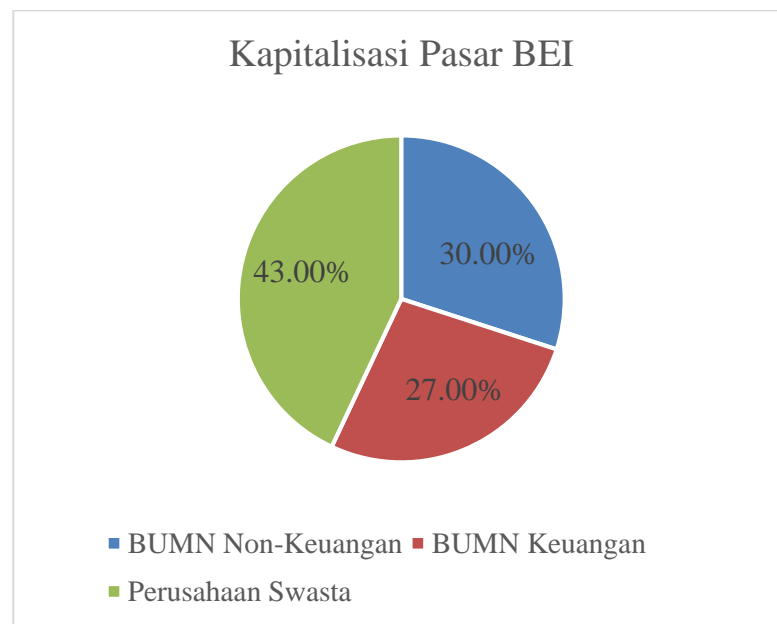
terdaftar atau *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tahun 1991. Perkembangan BUMN non-keuangan tidak mengalami banyak perubahan ditiap tahunnya. Untuk tahun 2014 sampai tahun 2017 jumlah BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tetap stabil yaitu berjumlah 16 perusahaan. Sedangkan untuk BUMN yang tidak terdaftar atau *non-listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk tahun 2014 berjumlah 85 perusahaan dan untuk tahun 2015 sampai tahun 2017 stabil di angka 84. Berdasarkan data tersebut total keseluruhan BUMN non-keuangan di tahun 2014 berjumlah 115 perusahaan dan menyusut menjadi 114 perusahaan di tahun 2015. Penyebab penyusutan BUMN non-keuangan tersebut dikarenakan PT Askes dan PT Jamsostek bergabung menjadi BPJS Ketenagakerjaan, 14 BUMN Perkebunan menjadi satu *Holding* BUMN Perkebunan, dan enam BUMN Kehutanan menjadi satu *Holding* BUMN Kehutanan. Di tahun 2017 juga terjadi penurunan menjadi 111 perusahaan dikarenakan adanya *holding* BUMN Pertambangan yaitu pengalihan saham negara pada PT Antam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk kepada PT Inalum (Persero). (BUMN, 2017).

Adapun alasan penulis memilih objek penelitian BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dikarenakan dari 111 total jumlah BUMN non-keuangan yang ada di Indonesia hanya 16 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau sebesar 0,14 persen dan hanya separuhnya sebesar 0,09 persen yang masuk daftar LQ45 serta Kompas 100 sebesar 0,13 persen (Saham OK, 2019). Serta perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan tahunannya sehingga ini merupakan salah satu wujud persiapan untuk menuju ke arah penerapan *Integrated Reporting* <IR> di Indonesia.

1.2 Latar Belakang Penelitian

BUMN mempunyai peranan penting sebagai tulang punggung perekonomian. Terbukti dengan meskipun secara angka hanya 5 persen dari saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) namun saham BUMN kuasai 26,1 persen kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia (BEI). Total dana perolehan Emiten BUMN non-

keuangan ini adalah 30 persen dari total selama IPO (PT Indopremier Sekuritas, 2019). Hal ini mendorong pengelolaan BUMN untuk lebih efisien dan diharapkan tingkat transparansi informasi juga meningkat sehingga di masa depan akan tetap dipercaya serta menambah daftar BUMN di Bursa Efek Indonesia (BEI).



Gambar 1.1
Kapitalisasi Pasar BEI
(Sumber: Saham OK, 2019)

Dalam era globalisasi perkembangan informasi dituntut untuk berkembang lebih cepat, perkembangan ini secara langsung juga mempengaruhi perkembangan lingkungan ekonomi yang membutuhkan informasi, informasi tersebut antara lain adalah informasi yang diperoleh dari laporan-laporan perusahaan. Laporan tahunan merupakan salah satu sumber informasi yang secara formal dipublikasikan (Ramadani, 2017). Menurut Kamus Bank Indonesia laporan tahunan adalah laporan yang menggambarkan perkembangan dan pencapaian yang berhasil dicapai perusahaan dalam satu tahun kerja. Isi laporan tahunan mencakup laporan keuangan dan prestasi akan kinerja perusahaan. Beberapa informasi ini digunakan oleh para pengguna laporan keuangan seperti *investor*, kreditur, karyawan, pemerintah dan pengguna lainnya guna pembuatan keputusan ekonomi. Semakin berkembangnya kebutuhan pengambilan keputusan atas suatu perusahaan menimbulkan isu baru

dalam akuntansi. Laporan keuangan tidak hanya memenuhi kebutuhan informasi *investor* dan kreditor dalam kapasitas mereka sebagai penyedia sumber daya keuangan perusahaan, tetapi laporan keuangan juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai efek keberadaan perusahaan pada lingkungan sosial dan lingkungan alam. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan sebuah konsep atas laporan keuangan yang tidak parsial melainkan terintegrasi atau terpadu dan saling terhubung antara satu dengan yang lainnya (Novaridha, 2017). Laporan yang terpisah membuat pemangku kepentingan mendapat informasi yang kurang mengenai keseluruhan organisasi sehingga akan mempengaruhi pengambilan keputusan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Pada tahun 1999, *Global Reporting Initiative* (GRI) mengagas *Sustainability Reporting* (SR) yang menyajikan pelaporan informasi sosial, lingkungan dan ekonomi serta tata kelola organisasi. SGRI sendiri diinisiasi oleh *United Nation Environmental Program* pada tahun 1997 dan menjadi independen di tahun 2002. SR yang dikembangkan oleh GRI didasarkan pada konsep *triple bottom-line of business* yang digagas oleh Elkington. Tiga dimensi dalam *triple bottom-line reporting* seringkali disebut dengan dimensi *profit, people* dan *planet* (3P). Namun, banyak perusahaan yang masih memisahkan antara *sustainability report* dengan laporan tahunan perusahaan. Walaupun biasanya aspek lingkungan dan sosial termasuk ke dalam laporan tahunan perusahaan kepada para pemegang sahamnya, namun laporan keuangan dan laporan kinerja lingkungan dan sosial masih merupakan dua laporan yang terpisah. Kelemahan dari laporan yang terpisah adalah berkurangnya kemanfaatan dari laporan tersebut (Ahmad, 2017). Laporan tahunan yang penekanannya pada laporan keuangan (*financial report*) lebih ditujukan kepada para pemilik modal dan bersifat wajib (*mandatory*). Sedangkan laporan berkelanjutan ditujukan kepada pihak yang lebih luas, yaitu kepada para pemangku kepentingan dan umumnya bersifat sukarela (*voluntary*). Ketidak-keterkaitan informasi antara kedua laporan tersebut menjadikan adanya gagasan untuk mengintegrasikannya (Eccles & Krzus, 2010). Pada saat ini laporan non-keuangan tidak cukup relevan dan informasi non keuangan akan lebih baik diintegrasikan dengan laporan keuangan (ACCA & Eufosif, 2013). Menurut teori legitimasi dalam

penelitian Lighthstone&Driscoll (2008) perusahaan yang dengan sukarela mengungkapkan berita baik dan berita buruk secara bersamaan akan memberikan ekspektasi positif dari *stakeholder*. Teori legitimasi didukung juga oleh teori *stakeholder* yang mengemukakan bahwa *stakeholder* memiliki harapan bahwa perusahaan dapat memberikan informasi terkait operasi perusahaan secara transparan dan akuntabilitas.

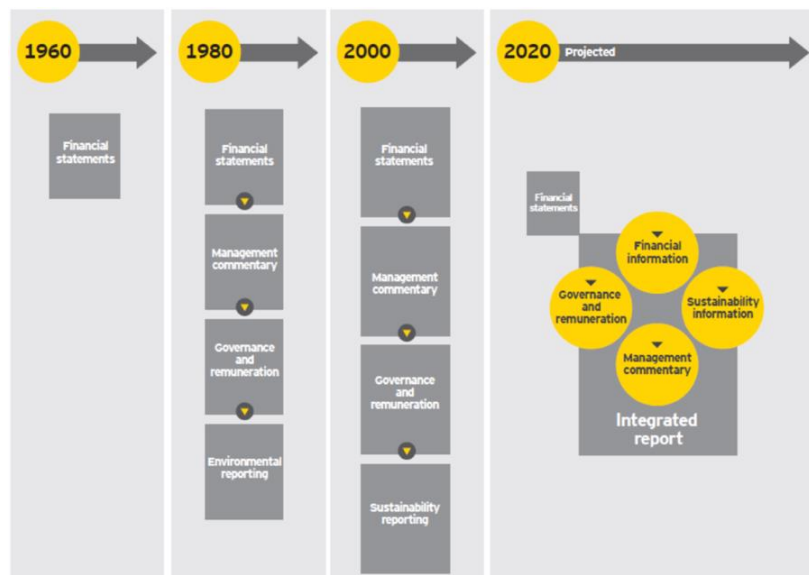
Adanya kebutuhan pelaporan yang sesuai dengan kepentingan *stakeholders*, Pada tahun 2011, *the International Integrated Reporting Committee* (IIRC) dan didukung oleh GRI mengembangkan model pelaporan korporasi yang baru yang disebut *Integrated Reporting <IR>*. IIRC merupakan lembaga internasional yang terdiri dari pembuat peraturan, *investor*, perusahaan, penyusun standar, profesi akuntan, dan masyarakat. (Kustiani, 2016). Terdapat delapan *content elements* di dalam *Integrated Reporting*, yaitu: 1) *Organizational overview and operating context*, 2) *Governance*, 3) *Business model*, 4) *Risk and opportunities*, 5) *Strategy and resource allocation*, 6) *Performance*, 7) *Outlook*, 8) *Basis of Presentation*.

Tabel 1.1
Feature Utama Annual, Sustainability, dan Integrated Reporting

	<i>Annual report</i>	<i>Sustainability report</i>	<i>Integrated report</i>
Target	<i>Stakeholders</i> yang spesifik (<i>shareholders</i> dan <i>investor</i>)	Beberapa <i>Stakeholders</i> (perspektif sosial dan lingkungan)	Terutama penyedia modal finansial
<i>Mandatory/Voluntary</i>	<i>Mandatory</i>	<i>Voluntary</i>	<i>Voluntary</i>
Regulator	Nasional, hukum internasional dan IFRS	<i>Global reporting initiative</i> (GRI)	IIRC <i>framework</i>
Komparabilitas	Tinggi	Sedang	Rendah
<i>Industry customization</i>	Rendah	Sedang	Tinggi
<i>Assurance level</i>	Tinggi	Rendah	Rendah
Jangkauan	Entitas laporan keuangan (perusahaan atau <i>group</i> perusahaan)	Lebih luas dari entitas laporan keuangan	Lebih luas dari entitas laporan keuangan

Sumber : *Integrated Reporting* (Busco, Frigo, Riccaboni, & Quattrone, 2013)

IIRC mendefinisikan *Integrated Reporting* <IR> sebagai suatu proses komunikasi informasi suatu organisasi yang tercermin dalam “*integrated report*” kepada para pemangku kepentingan tentang penciptaan nilai dari waktu ke waktu. *Integrated Report* sendiri didefinisikan sebagai suatu komunikasi yang ringkas dan terintegrasi tentang bagaimana strategi, tata kelola dan remunerasi, kinerja dan prospek suatu organisasi menghasilkan penciptaan nilai dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang. *Integrated Reporting* <IR> memberikan suatu pendekatan pelaporan yang lebih luas dibandingkan dengan pelaporan tradisional yang ada saat ini. (BINUS UNIVERSITY, 2019). Konsep *Integrated Reporting* <IR> menggambarkan hubungan antara strategi perusahaan, tata kelola, kinerja keuangan, dan CSR dalam konteks ekonomi operasi perusahaan (Kustiani, 2016). Hal tersebut yang membedakan antara *Integrated Reporting* <IR> dengan *Sustainability Reporting* (SR). Untuk ditahun 2000 hingga 2019 *Annual Report* dan *Sustainability Reporting* pelaporannya masih secara terpisah namun untuk di tahun 2020 IIRC merencanakan untuk menggabungkan *Annual Report* dan *Sustainability Reporting*. Berikut merupakan gambaran evolusi pelaporan perusahaan yang dibuat oleh IRCC.



Gambar 1.2

Evolution of Corporate Reporting

(Sumber: IIRC, *Towards Integrated Reporting: Communicating Value in the 21st Century*)

Pengungkapan perusahaan yang mengadopsi *Integrated Reporting* <IR> pada dasarnya masih bersifat *voluntary*, karena tidak semua negara telah menetapkan mandat atas *Integrated Reporting* <IR>. Salah satu negara pelopor penerapan *Integrated Reporting* <IR> adalah Afrika Selatan melalui pedoman King III, yaitu perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Johannesburg diwajibkan menerbitkan *Integrated Reporting* <IR> sejak tahun 2010 (Ahmad, 2017). Di Indonesia sendiri, belum mewajibkan atau membujuk perusahaannya untuk mengadopsi atau menerapkan *Integrated Reporting* <IR> penuh, tetapi perusahaan Indonesia sudah menerbitkan Laporan Tahunan yang menggabungkan informasi keuangan dan non-keuangan. (Fadly, 2019).

Dengan rencana pergeseran *Sustainability Reporting* ke *Integrated Reporting*, maka perusahaan-perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus mempersiapkan diri menyediakan informasi-informasi yang dipersyaratkan dalam *Integrated Reporting* <IR> sehingga ketika Indonesia beralih menggunakan pedoman *Integrated Reporting* <IR> perusahaan-perusahaan tersebut dengan cepat dapat menyesuaikan elemen-elemen laporan tahunannya dengan ketentuan *Integrated Reporting* <IR> tersebut. *Integrated Reporting* <IR> memberikan manfaat bagi perusahaan untuk lebih transparan dalam pelaporan untuk mengurangi *agency problem* berdasarkan *agency theory* sehingga akan meningkatkan kepercayaan *stakeholder*.

Penyampaian informasi secara transparan dapat didorong dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance*. Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia saat ini relatif tertinggal dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN. Padahal penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik adalah aspek utama untuk membangun fundamental perusahaan yang kokoh dan laporan tahunan yang didukung *Good Corporate Governance* (GCG) akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan *investor*. Hanya dua emiten dari Indonesia yang masuk dalam daftar 50 Emiten Terbaik dalam Praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di ASEAN dalam ajang penganugerahan ASEAN

Corporate Governance Awards 2015. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) merupakan perusahaan yang paling baik dalam penyajian laporan keuangan yang mencerminkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Kinerja keuangan perusahaan tidak akan berkelanjutan bila tidak dilandasi oleh praktik-praktik tata kelola yang baik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *Integrated Reporting* diantaranya adalah kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen, dan dewan direksi.

Kepemilikan institusional adalah presentase kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainya pada akhir tahun. Menurut Istiantoro *et al.*, (2017) salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan adalah kepemilikan institusional. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Serta agar laporan keuangan menghasilkan integritas laporan keuangan yang bermutu sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* maka *corporate governance* perusahaan harus mempunyai struktur yang tertata dengan baik, salah satu struktur *corporate governance* yang mempunyai peranan dan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi *monitoring* adalah peranan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan dewan direksi. Penelitian Novaridha (2017) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *Integrated Reporting*. Sedangkan penelitan Nurrahman (2013) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan.

Dewan direksi memiliki peran penting dalam mekanisme penerapan *corporate governance* yaitu untuk menentukan kebijakan yang akan dijalankan perusahaan serta perlindungan terhadap pihak *investor* dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Berdasarkan *code of corporate governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) menyatakan fungsi pengelolaan perusahaan yang dilakukan dewan direksi mencakup lima fungsi yaitu kepengurusan, manajemen resiko, pengendalian internal, komunikasi dan tanggung jawab sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Buitendag *et al.*, (2017)

menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh dan memiliki hubungan positif terhadap *Integrated Reporting*, sebab dewan yang lebih besar akan meningkatkan kekuatan manajerial dan dapat meningkatkan fokus pada pelaporan karena jumlah anggota eksekutif di dewan meningkat. Semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan akan dewan dalam jumlah yang besar akan semakin tinggi.

Komisaris independen keberadaannya sangat penting dalam konsep penerapan tata kelola perusahaan. Keberadaan komisaris independen dalam sebuah perusahaan dapat menjadi penyeimbang dalam pengambilan keputusan ekonomi khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Jika perusahaan memiliki komisaris independen maka laporan keuangan yang dilaporkan manajemen cenderung berintegritas, karena di dalam perusahaan terdapat badan-badan yang mengawasi dan melindungi hak pihak-pihak di luar manajemen perusahaan. Komisaris independen merupakan solusi terbaik dalam mengurangi resiko manipulasi yang dilakukan oleh manajemen terhadap keintegritasan laporan keuangan (Ahmad, 2017). Penelitian empiris yang dilakukan oleh Yanti (2017) memperoleh hasil bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap kualitas *Integrated Reporting*. Sedangkan penelitian Aziz (2014) menunjukkan hasil bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas pengungkapan *Sustainability Report*.

Komite audit adalah suatu badan yang dibentuk didalam perusahaan klien yang bertugas untuk memelihara independensi akuntan pemeriksa terhadap manajemen. Dibentuknya komite audit bertujuan untuk memelihara independensi auditor internal, penyempurnaan sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaannya serta mengevaluasi, menilai dan memutuskan apakah sebuah laporan keuangan layak diterbitkan atau tidak. Semakin banyak jumlah komite audit akan semakin besar tekanan kepada manajemen untuk menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas. Penelitian Ahmad (2017) menunjukkan hasil bahwa komite audit baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan Rerangka IR. Berbeda dengan penelitian Idah (2013) yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh

terhadap pengungkapan *Sustainability Report* dan tidak sejalan dengan teori dalam penelitian tersebut.

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Elemen-elemen *Good Corporate Governance* terhadap *Integrated Reporting* (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017)**”.

1.3 Rumusan Masalah

Untuk ditahun 2000 hingga 2019 *Annual Report* dan *Sustainability Reporting* pelaporannya masih secara terpisah namun untuk di tahun 2020 IIRC merencanakan untuk menggabungkan *Annual Report* dan *Sustainability Reporting* (IIRC, 2013). Dengan rencana pergeseran *Sustainability Reporting* ke *Integrated Reporting*, maka perusahaan-perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus mempersiapkan diri menyediakan informasi-informasi yang dipersyaratkan dalam *Integrated Reporting* <IR> sehingga ketika Indonesia beralih menggunakan pedoman *Integrated Reporting* <IR> perusahaan-perusahaan tersebut dengan cepat dapat menyesuaikan elemen-elemen laporan tahunannya dengan ketentuan *Integrated Reporting* <IR>. *Integrated Reporting* <IR> memberikan manfaat bagi perusahaan untuk lebih transparan dalam pelaporan sehingga akan meningkatkan kepercayaan *stakeholder*.

Penyampaian informasi secara transparan dapat didorong dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance*. Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia saat ini relatif tertinggal dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN. Padahal penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik adalah aspek utama untuk membangun fundamental perusahaan yang kokoh.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi pertanyaan penelitian yang akan diuji lebih lanjut di penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi elemen-elemen *Good Corporate Governance* terhadap *Integrated Reporting* pada perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 sampai 2017?
2. Apakah terdapat pengaruh secara simultan elemen-elemen *Good Corporate Governance* terhadap *Integrated Reporting* pada perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial dari:
 - a. Kepemilikan institusional terhadap *Integrated Reporting* pada perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017?
 - b. Dewan direksi terhadap *Integrated Reporting* pada perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017?
 - c. Komisaris independen terhadap *Integrated Reporting* pada perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017?
 - d. Komite audit terhadap *Integrated Reporting* pada perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi elemen-elemen *Good Corporate Governance* terhadap *Integrated Reporting* pada perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara simultan elemen-elemen *Good Corporate Governance* terhadap *Integrated Reporting* pada perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017.

3. Untuk mengetahui secara parsial dari:
 - a. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Integrated Reporting* pada perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017.
 - b. Pengaruh dewan direksi terhadap *Integrated Reporting* pada perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017.
 - c. Pengaruh komisaris independen terhadap *Integrated Reporting* pada perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017.
 - d. Pengaruh komite audit terhadap *Integrated Reporting* pada perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai *Integrated Reporting*. Selain itu, memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan sumber dan teori untuk kepentingan diantaranya,

1.6.1 Aspek Teoritis

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dari pengembangan pengetahuan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis, sarana untuk mengaplikasikan dan mengintegrasikan pengetahuan, pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian, dan penerapan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.

2. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan informasi untuk mendukung penelitian lain dalam mengkaji bidang yang sama dan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya.

1.6.2 Aspek Praktis

1. Perusahaan

Hasil penelitian dapat berguna untuk memberikan informasi kepada perusahaan yang akan menerbitkan *Integrated Reporting* mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Integrated Reporting*.

2. Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai *Integrated Reporting* sebelum investor melakukan investasi.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel bebas serta satu variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan yakni kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen, dan dewan direksi. Adapun variabel terikat yang akan diuji apakah dipengaruhi variabel bebas yaitu *Integrated Reporting*.

1.7.2 Lokasi Dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Bursa Efek Indonesia (BEI). Objek penelitian ini adalah *annual report* BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penulis mengambil data mengenai perusahaan dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dapat diakses melalui www.idx.co.id kemudian diolah kembali sesuai kebutuhan.

1.7.3 Waktu Dan Periode Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 dan periode penelitian ini pada tahun 2014 sampai tahun 2017.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika merupakan suatu pola dalam penyusunan tugas akhir untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai materi pembahasan dari bab pertama hingga bab terakhir, dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami

maksud dan isi dilakukannya penelitian ini. Maka sistematika penulisan penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang berisi fenomena, perumusan masalah yang diteliti berdasarkan latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis serta sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang melandasi penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian dan teknik penelitian dalam pengumpulan dan menganalisis data yang menyangkut mengenai variabel penelitian, definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode analisis data serta teknik analisis data yang digunakan untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DAN HASIL

Bab ini memaparkan deskripsi objek penelitian, analisis data, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima adalah bab terakhir dalam penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran dari hasil penelitian yang dapat memberikan rekomendasi untuk penelitian sejenis di masa mendatang.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN